**INSPEKTORAT KABUPATEN SIGI OPTIMIS**

**BISA RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN LAGI**

****

*www.kemendagri.go.id*

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi harus optimis bisa meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sigi Tahun 2014 ini. Demikian disampaikan Inspektur Inspektorat Kabupaten Sigi, R Nolly Mua, SH, MH, saat ditemui di ruang kerjanya, di Kantor Inspektorat Sigi Biromaru, Selasa (13/1) Kemarin.

Inspektur Nolly menjelaskan, kalau yang menjadi faktor menurunnya predikat opini WTP menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, dalam audit atas LKPD Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2013 lalu, dikarenakan persoalan penertiban aset di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Olehnya persoalan penertiban aset daerah dalam LKPD Tahun Anggaran 2014 ini, bisa diantisipasi segera mungkin, sehingga predikat opini WTP bisa kembali diraih,” ujarnya.

Menurutnya, untuk menyelesaikan persoalan penertiban aset disetiap SKPD masing-masing, sebenarnya bisa tidak melibatkan Inspektorat dan DPPKAD. Karena cukup Instansi terkait saja, maka pasti bisa menyelesaikan persoalan penertiban aset tersebut melalui Kepala Seksi pengadaaan barang yang ada di lingkup instansi masing-masing.

Olehnya, sekedar diingatkan bahwa semua Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Sigi ini, kiranya harus bisa mengakomodir semua bawahannya, karena jangan sampai ada bawahan yang tidak diakomodir pimpinannya, maka yang ditakutkan akan memiliki niat yang tidak baik untuk menjebak pimpinan. “Dengan jebakan, pasti menjadi temuan yang tidak diinginkan yang diakibatkan adanya Miskomunikasi antara pimpinan dengan anggotanya,” pungkasnya.

**Sumber Berita:**

Harian Radar Sulteng, *Inspektorat Optimistis Bisa Raih Opini WTP Lagi*, Sabtu, 10 Januari 2015.

**Catatan:**

* Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa BPK memiliki 3 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
* Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
* Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (*audited financial statements*) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD.
* Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).